

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PUTUSAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS
DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Kasus Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

CLARA MERFIN GULO

2110112019

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H.

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 07/PK-IV/II/2026

	No. Alumni Universitas	Clara Merfin Gulo	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Hilibadalu/08 Juni 2003 b. Nama Orangtua : Firman Gulo, Meniria Lombu c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2110112019	f. Tanggal Lulus : 21 April 2026 g. Predikat Lulus : Sangat memuaskan h. Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan i. IPK : 3,87 j. Alamat : Seberang Palinggam, Padang Selatan, Padang	

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

(Studi Kasus Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg)

(Clara Merfin Gulo, 2110112019, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 Hlm, 2026)



ABSTRAK

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai upaya pemberantasan narkotika termasuk dengan menetapkan ketentuan pidana minimum khusus terhadap pelaku sebagai upaya menjamin efek jera dan mencegah disparitas pidana. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan atas pelanggaran Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, padahal dalam pasal tersebut sudah diatur batas minimumnya adalah 5 tahun. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap kasus tindak pidana narkotika pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, dan 2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg yang menjatuhkan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkotika sudah relevan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang datanya dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang ketentuan minimumnya adalah 5 tahun, namun dalam putusannya hakim malah menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum khusus tanpa dasar hukum yang sah. Hakim memang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh asas legalitas yang mengharuskan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg tidak relevan dengan asas kepastian hukum karena penyimpangan terhadap batas minimum yang telah ditentukan undang-undang pada putusan ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar hakim menerapkan pidana minimum khusus secara konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah perlu membuat aturan terkait batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menjamin kepastian hukum, mencegah disparitas dan memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Pidana Minimum Khusus, Kepastian Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 21 April 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Yandriza, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Clara Merfin Gulo	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Hilibadalu/08 th June 2003	b. Parents' Name : Firman Gulo, Meniria Lombu	c. Faculty : Law
	d. Concentration : Criminal Law	e. Student ID : 2110112019	f. Graduation Date : 21 st April 2026
			g. Pass Predicate : Very Satisfactory
			h. Length of Study : 4 years 8 months
			i. GPA : 3,87
			j. Address : Seberang Palinggam, Padang Selatan, Padang

ANALYSIS OF THE RESOLUTION OF NARCOTICS CRIMES IN CRIMINAL DECISIONS UNDER SPECIAL MINIMUM PENALTIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY
(Case Study Number 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg)

(Clara Merfin Gulo, 2110112019, Faculty of Law, Andalas University, 84 Pages, 2026)

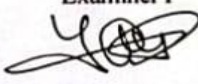

ABSTRACT

Law No. 35 of 2009 on Narcotics has clearly regulated efforts to eradicate narcotics, including by establishing specific minimum criminal penalties for perpetrators as a means of ensuring deterrence and preventing criminal disparities. However, in practice, there are still court decisions that impose penalties below the specific minimum. One such case is found in the Padang District Court Decision Number 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, in which the defendant was sentenced to 4 years and 10 months in prison for violating Article 112 paragraph (2) of the Narcotics Law, even though the minimum sentence stipulated in that article is 5 years. This study has two research questions, namely: 1. What was the basis for the judge's consideration in imposing a sentence below the specific minimum penalty for narcotics crimes in decision number 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, and 2. Is the decision of the Padang District Court in case number 418/pid.sus/2024/PN Pdg, which imposed a special minimum sentence in a narcotics crime case, relevant to the principle of legal certainty? The research method used is a descriptive normative legal analysis using a legislative approach and a case approach, with data collected through literature review. The results of the investigation show that in his consideration, the judge stated that the defendant was proven to have violated Article 112 paragraph (2) of the Narcotics Law, which carries a minimum sentence of 5 years, but in his ruling, the judge instead handed down a sentence below the minimum penalty without a valid legal basis. Judges do have discretion in deciding cases, but this discretion is limited by the principle of legality, which requires that decisions be in accordance with applicable legal provisions. Furthermore, this study shows that the imposition of a sentence below the specific minimum penalty in decision No. 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg is not relevant to the principle of legal certainty because the deviation from the minimum limit specified by law in this decision causes inconsistency in the application of norms and a lack of legal protection for the community. Based on the results of this study, it is recommended that judges apply special minimum penalties consistently in accordance with applicable laws and regulations, and that the government needs to establish rules regarding the limits of judicial discretion in handing down verdicts, in order to ensure legal certainty, prevent disparities, and provide legal protection.

Keywords : Drug Crimes, Special Minimum Penalties, Legal Certainty

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by April 21st, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Yandriza, S.H., M.H.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: